

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pemkab Butuh Rp 60 M
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.7
Edisi	: Senin, 4 Juni 2018

## “Cover” Kesehatan Masyarakat Miskin

### Pemkab Butuh Rp 60 M

NGAMPRAH, (GM).-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk mengcover kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Meski demikian, hingga saat ini, masih sulit untuk mewujudkan anggaran tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB Hermawan Widjajanto di Ngamprah, Minggu (3/6). Hermawan menyebutkan, sekitar 542.000 jiwa di KBB dikategorikan miskin. Namun saat ini baru 72 persen yang tercover kesehatannya oleh pemerintah daerah.

“Untuk mengcover semua, pemerintah daerah butuh anggaran Rp 60 miliar per tahun. Namun, pemda tidak mungkin mengcover semua,” katanya.

Hermawan mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah menjamin layanan kesehatan bagi warga miskin. Mulai dari layanan Jamkesda, BPJS hingga Jampersal.

Menurutnya, saat ini pemerintah melalui Dinkes KBB sedang melakukan pendataan keluarga sehat. Hal itu juga dilakukan untuk memastikan jumlah masyarakat miskin yang ada di KBB saat ini.

“Pendataan keluarga sehat di setiap kecamatan terus kita lakukan. Sebab, kita juga butuh data kembali masyarakat yang mana harus dicover kesehatan dan tidak,” katanya.

**Sarana kesehatan**  
Pemkab Bandung Barat telah



**Hermawan Widjajanto**

menyiapkan sarana prasarana kesehatan. Mulai dari 3 RSUD yang berada di Kecamatan Cililin, Lembang dan Cikalongwetan. Ditambah dengan hadirnya 32 puskesmas dengan 6 puskesmas di antaranya memiliki tempat perawatan dan sisanya 26 puskesmas tanpa tempat perawatan.

Hermawan juga memastikan, fasilitas dan tenaga medis yang melayani masyarakat untuk persalinan atau melahirkan sudah lengkap. Dengan demikian rumah sakit milik pemerintah daerah tidak ada alasan menolak pasien.

“Fasilitas persalinan di Bandung Barat sudah cukup. 11 puskesmas bisa melayani untuk persalinan. Termasuk rumah sakit sudah siap untuk dokter kandungan,” kata Hermawan.  
**(amr)\*\***